

## The Role of Government in Efforts to Improve Kuta Beach Tourist Attraction Facilities

I Gusti Ayu Windhautami D<sup>1\*</sup>, Ida Bgs Gede Agung Widana<sup>2</sup>, I Gede Made Sukariyanto<sup>3</sup>

Program Studi Destinasi Pariwisata, Politeknik Pariwisata Bali

**Corresponding Author:** I Gusti Ayu Windhautami D

[windaayu137@gmail.com](mailto:windaayu137@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Role of Government, Kuta Beach Tourist Attraction, Tourist Attraction Facilities

*Received* : 01 December 2024

*Revised* : 17 December 2024

*Accepted*: 20 January 2025

©2025 Windhautami D, Widana, Sukariyanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The existence of obstacles related to cleanliness, comfort and infrastructure facilities at Kuta Beach has become a criticism expressed by visitors through various social media platforms, such as Instagram, Tiktok and Youtube. These complaints must of course be addressed and followed up by the local government so that Kuta Beach becomes more organized and managed. This study aims to determine the Role of the Government in Efforts to Improve the Quality of Tourist Attraction Facilities at Kuta Beach, Badung Regency and what challenges and efforts are made by the Government in Efforts to Improve the Quality of Tourist Attraction Facilities at Kuta Beach. The analysis technique used is descriptive qualitative with purposive sampling as a method for determining informants. The informants selected were the Head of the Tourism Destination Division of the Badung Regency Tourism Office, the Head of the Water Resources Division of the PUPR Office of Badung Regency, the Head of the Cleanliness and B3 Waste Management Division of the Environment and Cleanliness Office and the Chairperson of the Regional Tourism Promotion Agency (BPPD) of Badung Regency. The results show that the government plays an active role in improving the quality of Kuta Beach facilities, the government acts as a regulator, implements changes, and motivates stakeholders.

## Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Fasilitas Daya Tarik Wisata Pantai Kuta

I Gusti Ayu Windhautami D<sup>1\*</sup>, Ida Bgs Gede Agung Widana<sup>2</sup>, I Gede Made Sukariyanto<sup>3</sup>

Program Studi Destinasi Pariwisata, Politeknik Pariwisata Bali

**Corresponding Author:** I Gusti Ayu Windhautami D

[windaayu137@gmail.com](mailto:windaayu137@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Peran Pemerintah, Daya Tarik Wisata Pantai Kuta, Fasilitas Daya Tarik Wisata

*Received :* 01 Desember 2024

*Revised :* 17 Desember 2024

*Accepted:* 20 Januari 2025

©2025 Windhautami D, Widana, Sukariyanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Adanya kendala terkait dengan kebersihan, kenyamanan serta fasilitas prasarana di Pantai Kuta menjadi kritik yang dilontarkan oleh pengunjung melalui berbagai platform media sosial, seperti, Instagram, Tiktok maupun Youtube. Keluhan-keluhan tersebut tentunya harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar Pantai Kuta menjadi lebih tertata dan terkelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Fasilitas Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung dan bagaimana tantangan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Fasilitas Daya Tarik Wisata Pantai Kuta. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan *purposive sampling* sebagai metode penentuan informan. Informan yang dipilih yaitu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Badung Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Badung, Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kab. Badung. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas fasilitas Pantai Kuta pemerintah bertindak sebagai regulator, melaksanakan perubahan, dan memotivasi para pemangku kepentingan.

---

## PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata di Indonesia menggunakan konsep pariwisata yang dirumuskan dalam Undang – undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan “bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan nilai – nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional pentingnya pembangunan kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global”.

Sektor pariwisata yang mengalami perkembangan di Indonesia adalah wisata alam karena peran alam sebagai sumber daya alam dalam kepariwisataan sangat besar dan penting. Hal ini bisa dilihat dari jenis obyek dan daya tarik wisata dan motivasi kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Potensi perairan yang berupa lautan dan pantai merupakan salah satu obyek wisata yang banyak digemari oleh wisatawan mancanegara maupun domestik.

Bali merupakan destinasi unggulan di Indonesia bagi wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik.

Pulau Bali terkenal akan budaya, adat istiadat, kesenian dan keindahan alamnya sehingga Bali dijuluki *The Last Paradise on Earth* atau surga terakhir di bumi. Bali menjadi urutan pertama destinasi wisata paling populer di dunia berdasarkan Tripadvisor Traveller’s Choice Awards 2021 dan pada tahun 2023 Bali menjadi urutan kedua destinasi wisata paling populer didunia berdasarkan Tripadvisor Traveller’s Choice Awards 2023 mengungguli London dan Paris (Kemenparekraf, 2023). Pantai Kuta merupakan salah satu dari sekian banyak wisata alam yang ada di Bali. Pantai Kuta terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kabupaten paling selatan di Provinsi Bali dengan luas 418,52 Km<sup>2</sup> (7,43 % luas Pulau Bali).

Daya tarik wisata, juga dikenal sebagai "tujuan wisata", adalah kumpulan dari daya tarik, atraksi, fasilitas pendukung, dan kunjungan wisata yang terletak di dalam suatu wilayah administrasi. Kotler (2010) menawarkan teori bahwa Daya Tarik wisata dapat berupa lokasi yang memiliki batasan nyata, seperti batasan politik, batasan fisik, atau pasar saat ini. Adanya Daya Tarik wisata bertujuan untuk membangun suatu tempat wisata dengan semua elemennya, seperti sumber daya, atraksi, keunikan, dan keindahan, yang menjadi tujuan rekreasi bagi wisatawan. Wisatawan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan istirahat, bisnis, pengobatan, kunjungan keagamaan, atau studi, (Sugiama,2011).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyatakan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Maret 2024 dengan share sebesar 24,28 persen. Sedangkan wisatawan pada bulan Juni 2024 tercatat sebanyak 518.819 kunjungan, turun 4,73 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 544.601 kunjungan. Wisatawan yang berasal dari Australia mendominasi kedatangan wisman ke Bali pada bulan Juni 2024 dengan share sebesar 25,33 persen. Banyaknya wisatawan mancanegara maupun

domestik yang berkunjung ke Pantai Kuta tidak luput akan adanya fenomena yang menandakan adanya kendala terkait dengan kebersihan, kenyamanan serta fasilitas prasarana di Pantai Kuta. Fenomena ini tercermin dalam kritik yang dilontarkan oleh pengunjung melalui berbagai platform media sosial, seperti, Instagram, Tiktok maupun Youtube. Banyak pengunjung Pantai Kuta yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan komentar mereka terhadap kebersihan, kenyamanan terganggu serta fasilitas prasarana yang kurang memadai. Keluhan-keluhan tersebut meliputi kebersihan lingkungan, pedagang yang menawarkan dagangannya secara memaksa, serta beberapa fasilitas yang kurang memadai. Fenomena ini berpotensi mempengaruhi pengalaman wisata para pengunjung, menurunkan tingkat kepuasan mereka, dan berdampak negatif pada citra destinasi wisata tersebut. Misalnya mengenai persoalan sampah yang dikeluhkan oleh wisatawan dalam akun media sosial Tiktok.

Pada dasarnya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas daya tarik wisata memiliki fungsi yang sangat krusial dan multifaset demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Menindaklanjuti permasalahan mengenai keluhan sampah di Pantai Kuta, pemerintah harus melaksanakan perannya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, serta motivator. Mengatasi kendala fasilitas prasarana yang menghambat pengalaman positif wisatawan di Pantai Kuta memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah, yaitu DISPAR, DPUPR, DLHK dan BPPD serta Pihak Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai Kuta. Koordinasi yang baik antara entitas-entitas ini akan memastikan peningkatan kualitas fasilitas dan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para wisatawan, serta berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisata secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik "Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Fasilitas Daya Tarik Wisata Pantai Kuta". Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah berperan dalam meningkatkan fasilitas daya tarik wisata Pantai Kuta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peran Pemerintah**

Menurut Arif (2012:66) peran pemerintah ada empat yaitu 1) sebagai regulator Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, 2) sebagai dinamisator Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Masyarakat, 3) sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan, 4) sebagai motivator Motivator yaitu Fungsi Pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

### **Daya Tarik Wisata**

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pengertian daya tarik adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa potensi daya tarik wisata diartikan sebagai segala sumber daya alam, budaya dan buatan manusia yang seluruhnya dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata (Pujaasawa & Ariana, 2015)

### **Fasilitas**

Menurut Kotler (2019:45) Fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada sebelum layanan dapat diberikan kepada konsumen. Contoh fasilitas antara lain kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior dan eksterior, dan tingkat kebersihan, terutama yang berkaitan erat dengan apa yang diinginkan, dialami, maupun diterima secara langsung oleh masyarakat.

### **METODOLOGI**

Objek penelitian ini adalah peran pemerintah dalam upaya meningkatkan fasilitas daya tarik wisata Pantai Kuta. Penelitian ini berlokasi di Pantai Kuta yang terletak di Desa Adat Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu Data kualitatif merupakan data yang menjelaskan fenomena yang menggambarkan kondisi alamiah. Menurut Sugiyono (2019) data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan uraian-uraian singkat berupa informasi mengenai peran yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan fasilitas daya tarik wisata Pantai Kuta.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, seperti telah dikemukakan oleh Sugiyono (2015) bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah empat instansi dinas yaitu Dinas

Pariwisata Kabupaten Badung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Badung, dan Pihak Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai Kuta. Pemilihan informan kunci pada penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata Kab. Badung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Sedangkan untuk pemilihan informan utama yaitu Pihak Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai Kuta karena pihak pengelola merupakan peneliti yang langsung terjun dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan fasilitas daya tarik wisata. Peneliti menganggap bahwa sesuai jabatannya mereka mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang sudah peneliti siapkan.

## HASIL PENELITIAN

### Profil Informan

Dalam memahami dinamika pariwisata di Pantai Kuta, identifikasi pemangku kepentingan dan pemain utama menjadi krusial. Profil informan merupakan langkah awal dalam mengeksplorasi beragam perspektif yang memengaruhi upaya meningkatkan kualitas fasilitas pada daya tarik tersebut. Melalui wawancara dengan berbagai informan, kami dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang peran serta mereka, pandangan, serta kontribusi dalam pengembangan pariwisata Pantai Kuta. Dalam konteks ini, kami mengidentifikasi beberapa informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu terkait dan merupakan pemangku kepentingan utama dalam industri pariwisata. Dengan memperoleh profil informan yang lengkap, kami dapat lebih memahami dinamika, tantangan, dan upaya yang terlibat dalam upaya meningkatkan fasilitas pada Daya Tarik Wisata Pantai Kuta.

Table 1. Profil Informan

No.	Nama Informan	Umur	Pekerjaan	Jabatan
1.	I Gede Made Sukayasa, ST., MT.	56 Tahun	Dinas Pariwisata	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
2.	Ir. Anak Agung Gede Agung Dalem, ST., MT.	56 Tahun	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3
3.	Anak Agung Gede Rama Putra Pelayun, ST.	47 Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kepala Bidang Sumber Daya Air
4.	Ida Bagus Nama Rupa	44 Tahun	Badan Promosi Pariwisata Daerah	Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Badung
5.	I Putu Gilang Bayu Sadra Putra, SE	28 Tahun	Asisten Manajer Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai Kuta	Asisten Manajer Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai Kuta

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Dinas Pariwisata

#### a. Sebagai Regulator

Dinas Pariwisata memiliki peran krusial dalam mengontrol dan mengatur penyediaan fasilitas prasarana yang mendukung pariwisata di Pantai Kuta.

#### b. Sebagai Dinamisator

Dinas Pariwisata harus mampu merancang dan mengarahkan perubahan fasilitas demi menjaga daya tarik Pantai Kuta yang dinamis. Inisiatif konkret yang diambil oleh Dinas Pariwisata termasuk penyesuaian fasilitas rekreasi dan hiburan sesuai dengan tren dan preferensi wisatawan.

#### c. Sebagai Fasilitator

Dinas Pariwisata memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengembangan fasilitas rekreasi dan hiburan yang mendukung pariwisata di Pantai Kuta. Kolaborasi dengan pihak swasta dan pengusaha lokal menjadi kunci dalam mempercepat proses pembangunan fasilitas serta meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung.

#### d. Sebagai Motivator

Dinas Pariwisata harus mendorong partisipasi aktif dari pihak swasta dan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan fasilitas pariwisata di Pantai Kuta.

### 2. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Sebagai Regulator

DPUPR memiliki tanggung jawab untuk mengatur perizinan dan regulasi terkait pengembangan infrastruktur di sekitar Pantai Kuta.

#### b. Sebagai Dinamisator

DPUPR harus mampu menyesuaikan perencanaan dan pengembangan infrastruktur dengan dinamika perkembangan wisata di Pantai Kuta.

#### c. Sebagai Fasilitator

DPUPR berperan sebagai fasilitator dalam kerja sama dengan pihak swasta dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara pengembangan fasilitas infrastruktur di sekitar Pantai Kuta.

#### d. Sebagai Motivator

DPUPR mendorong partisipasi aktif dari pihak swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur.

### 3. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

#### a. Sebagai Regulator

DLHK memiliki peran krusial sebagai regulator dalam mengawasi dan mengontrol fasilitas prasarana di Pantai Kuta guna memastikan kebersihan dan kelestariannya. DLHK bertanggung jawab memastikan bahwa fasilitas umum seperti tempat pembuangan sampah, kebersihan area Pantai Kuta, kebersihan pada toilet dan ruangan ganti.

#### b. Sebagai Dinamisator

DLHK berperan aktif dalam beradaptasi terhadap perubahan permintaan pengunjung terhadap fasilitas lingkungan di sekitar Pantai Kuta. Sebagai

- dinamisator DLHK mendorong pemerintah Kuta dengan desa adat dan pengelola Pantai Kuta untuk melakukan apa yang diinginkan oleh wisatawan sehingga wisatawan tersebut berminat untuk berkunjung kembali.
- c. Sebagai Fasilitator  
DLHK memastikan pengelolaan limbah berjalan baik dengan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang.
  - d. Sebagai Motivator  
DLHK memiliki tim sosialisasi selain untuk mensosialisasikan kepada pengurus-pengurus desa serta kelompok-kelompok tertentu akan kami berikan sosialisasi.
4. Peran Badan Promosi Pariwisata Daerah
- a. Sebagai Dinamisator  
Melakukan BPPD juga akan menyerap *request* ataupun *interest* permintaan dari pengunjung Pantai Kuta.
  - b. Sebagai Fasilitator  
Memfasilitasi segala bentuk promosi dalam kegiatan promosinya BPPD melakukan aktivasi dengan cara mengundang sebanyak-banyaknya *stakeholders* untuk mencoba fasilitas-fasilitas baru yang saat ini telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Badung agar dapat disampaikan oleh wisatawan dengan adanya pembangunan dan penataan di Pantai Kuta.
  - c. Sebagai Motivator  
BPPD telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan konsep peran pemerintah sebagai motivator yakni BPPD dalam melakukan promosi di dalam dan di luar negeri, daya tarik wisata Pantai Kuta masuk dalam skala prioritas menjadi *point of interest* dengan *me-rebranding* Pantai Kuta kepada wisatawan.

### **Tantangan dan Upaya Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Fasilitas Daya Tarik Wisata Pantai Kuta**

Peran Pemerintah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan kawasan Pantai Kuta, karena peran pemerintah adalah sebagai regulator dalam pembuat kebijakan pengembangan destinasi wisata, selain itu dalam kolaborasi *pentahelix* juga dijelaskan bahwa ada lima lembaga penting yang harus bekerja sama untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Badung selama ini dapat berpotensi terjadinya kejenuhan. Untuk mengantisipasi terjadinya kejenuhan tersebut ke depannya perlu dipikirkan untuk melakukan pengembangan potensi kepariwisataan baru yang peka terhadap kebutuhan pasar pariwisata dengan memperhatikan prinsip 5 M (*Man, Money, Machine, Material, Methode*). Dalam menjalankan peran dan fungsinya pemerintah Kabupaten Badung dihadapkan dengan beberapa tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Badan Promosi Pariwisata Daerah mengalami beberapa tantangan yang

kompleks dalam menyusun perencanaan pengembangan pariwisata di Pantai Kuta.

1. Tantangan dan Upaya Dinas Pariwisata

Tuai kritikan, Pantai Kuta perlu dikelola lebih profesional. Kritikan ini melihat dari gerobak inovatif yang berbahan kayu ulin tidak terawat dan rusak dinilai membuat Pantai Kuta ini terlihat Kumuh dilansir pada (*Balipost.com.*). Dengan dilakukannya revitalisasi penataan Pantai Kuta diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta meningkatkan kunjungan wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan pemaparan mengenai tantangan Dinas Pariwisata menghadapi tantangan dalam konsep penataan revitalisasi Pantai Kuta serta kemacetan yang terjadi dalam mengadakan festival guna untuk menarik wisatawan untuk berkunjung.

2. Tantangan dan Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam melakukan penataan tersebut DPUPR mengalami beberapa tantangan. Penulis menganalisis dalam waktu pengerjaan penataan Pantai Kuta ini dikarenakan kawasan pariwisata (*public area*) pada saat pengerjaan harus tetap memikirkan keamanan dan kenyamanan wisatawan agar tidak mengganggu aktivitas yang dilakukan wisatawan. Konsep awal penataan gerobak kreatif kepada pedagang tidak sejalan dengan realisasi proyek yang sedang berlangsung. Memang betul pedagang itu kumuh, sebenarnya kumuh itu terjadi karena proyek yang berlangsung. Tembok itu dipendekkan sehingga terjadi kesan kumuh padahal kalau temboknya tinggi tidak akan kumuh. Saya menilai konsepnya memang bagus tetapi tidak sejalan dengan konsep awal di mana awalnya tidak akan menyentuh tembok tetapi tembok pantai posisinya dibikin lebih pendek. Berdasarkan pemaparan mengenai tantangan, dalam perannya sebagai fasilitator DPUPR menghadapi tantangan dalam konsep penataan infrastruktur demi untuk meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata Pantai Kuta.

3. Tantangan dan Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

DLHK dalam perannya menghadapi tantangan dapat diketahui dari masih terlihat banyaknya tumpukan sampah di kawasan Pantai Kuta serta pada saat musim angin barat terdapat penumpukan sampah laut di pesisir Pantai Kuta. Sejauh ini DLHK bersama dengan pemangku kepentingan setempat telah bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan sampah tersebut dilihat dari adanya kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan oleh organisasi maupun instansi untuk menjaga kebersihan Pantai Kuta. Pihak DLHK tetap siaga di lapangan dengan 10-15 petugas di setiap zona serta armada alat berat yang difokuskan pada wilayah Samigita. Dapat dilihat dalam hal ini DLHK dengan cepat menangani dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menghadapi fenomena angin barat yang membawa sampah kiriman ke berbagai titik pantai di sepanjang wilayah Kabupaten Badung. Penanganan yang optimal dapat memberikan kesan positif terhadap citra kawasan pantai seperti Pantai Kuta, Seminyak, dan Legian. Pantai-pantai

itu merupakan daya tarik wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sehingga penanganan akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

#### 4. Tantangan dan Upaya Badan Promosi Pariwisata Daerah

BPPD mengalami tantangan dalam melakukan kegiatan promosi yakni tantangan yang berasal dari luar karena saat ini banyaknya objek yang menawarkan hal-hal baru, unik dengan berbagai atraksi yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke objek tersebut. Dengan adanya revitalisasi penataan Pantai Kuta ini BPPD bersama dengan Dinas Pariwisata lebih berupaya dalam menggiatkan promosi Pantai Kuta dengan wajah barunya ini serta mengadakan *event-event* yang relevan serta memaksimalkan media digital sebagai wadah promosi BPPD bersama dengan Dinas Pariwisata.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas daya tarik wisata Pantai Kuta sangat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas daya tarik wisata dilihat dalam pengembangan infrastruktur dalam peran sebagai regulator pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan regulasi yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan kawasan Pantai Kuta, termasuk perizinan usaha dan pengawasan terhadap pelanggaran serta bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung daya tarik wisata, seperti akses jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum seperti toilet dan tsunami shelter. Infrastruktur yang baik meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengunjung. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan kebersihan Pantai Kuta melalui pengelolaan sampah dan fasilitas kebersihan yang memadai. Selain itu, meningkatkan keamanan dengan menyediakan personel penyelamat dan sistem keamanan yang efektif sangat penting untuk keselamatan pengunjung. Peran pemerintah sebagai dinamisator melakukan kampanye promosi dan pemasaran yang efektif, pemerintah dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara ke Pantai Kuta, ini mencakup pemasaran digital, kerja sama dengan agen perjalanan, dan penyelenggaraan acara-acara menarik. Peran pemerintah sebagai fasilitator pemerintah memfasilitasi pengembangan fasilitas seperti jogging track, walk way, skate board park, tsunami shelter dan juga fasilitas tambahan seperti restoran, kafe, dan pusat informasi wisata. Fasilitas ini meningkatkan pengalaman pengunjung dan membuat Pantai Kuta dapat menarik sebagai daya tarik wisata dan pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi industri pariwisata lokal dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengunjung. Ini mencakup pelatihan dalam layanan pelanggan, bahasa asing, dan manajemen pariwisata. Peran pemerintah sebagai motivator melakukan kolaborasi dengan sektor swasta seperti pengusaha lokal atau operator tur, penting untuk mempercepat pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata. Kolaborasi ini bisa mencakup investasi bersama dalam proyek-proyek pengembangan.

Tantangan yang ada yaitu berupa adanya penurunan minat wisatawan berkunjung ke Pantai Kuta yang disebabkan oleh kurangnya penataan dan juga pengelolaan yang menyebabkan kesan kumuh, sehingga Upaya yang dilakukan yaitu revitalisasi penataan Pantai Kuta sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta meningkatkan kunjungan wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu juga daerah lain seperti Canggu hingga Tabanan banyak menjadi pilihan para wisatawan sehingga ini menjadi tantangan untuk Dinas Pariwisata agar Pantai Kuta tetap dapat diminati oleh wisatawan meskipun Pantai Kuta. Dinas Pariwisata juga mengadakan festival setiap tahunnya yakni pada tahun 2023 Festival Bahari diadakan di Pantai Kuta sebagai upaya re-branding Destinasi Pantai Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita) dengan wajah baru pasca revitalisasi. Tantangan seperti promosi daya tarik wisata lain yang menawarkan hal-hal baru, unik dengan berbagai atraksi yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke daya tarik tersebut sehingga dengan adanya revitalisasi penataan Pantai Kuta pemerintah lebih berupaya dalam menggiatkan promosi Pantai Kuta dengan wajah barunya ini serta mengadakan event-event yang relevan serta memaksimalkan media digital sebagai wadah promosi. Dengan mengatasi tantangan dan melaksanakan upaya yang sesuai, pemerintah dapat meningkatkan fasilitas daya tarik wisata Pantai Kuta sebagai daya tarik wisata berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah yakni pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas daya tarik wisata Pantai Kuta sangat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas daya tarik wisata dilihat dalam pengembangan infrastruktur dalam peran sebagai regulator pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan regulasi yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan kawasan Pantai Kuta, termasuk perizinan usaha dan pengawasan terhadap pelanggaran serta bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung daya tarik wisata, seperti akses jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum seperti toilet dan tsunami shelter. Infrastruktur yang baik meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengunjung. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan kebersihan Pantai Kuta melalui pengelolaan sampah dan fasilitas kebersihan yang memadai. Selain itu, meningkatkan keamanan dengan menyediakan personel penyelamat dan sistem keamanan yang efektif sangat penting untuk keselamatan pengunjung. Peran pemerintah sebagai dinamisator melakukan kampanye promosi dan pemasaran yang efektif, pemerintah dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara ke Pantai Kuta, ini mencakup pemasaran digital, kerja sama dengan agen perjalanan, dan penyelenggaraan acara-acara menarik.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Pada penelitian ini Peran Pemerintha dapat diukur berdasarkan perannya, dalam penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor pendorong dan penghambat peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas daya tarik wisata.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing 1 saya (Ida Bgs Gede Agung Widana, SH., Dipl.TM., M.Par.) & dosen pembimbing 2 saya (I Gede Made Sukariyanto, S. Par., M.Par.) yang telah mengarahkan hingga mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyusunan tugas akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Arif, 2012. Konsep Pemerintahan. Jakarta: SalembaTeknika.

Audia. (2023). Pembuatan POP-UP Book Objek Wisata Kabupaten Pasaman Baru.

Asmaradana,dkk. (t.thn.). Perlindungan Hukum Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Pariwisata Di Pantai Kuta Badung .

Badung, D. P. (t.thn.). *Daya Tarik Wisata*. <https://dispar.badungkab.go.id/daya-tarik-wisata-67>.

Badung, D. P. (2022). *Penataan Kawasan Pantai Samigita*. <https://dpupr.badungkab.go.id/penataan-kawasan-pantai-pantai>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024

Bali, B. P. (2024). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Mei*. <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/717895/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-mei-2024.html>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024

Bali, P. P. (2024). *PJ Gubernur Bali Minta Pantai Kuta Ditata Kembali Agar Tidak Terkesan Kumuh*. <https://www.baliprov.go.id/web/pj-gubernur-bali-minta-pantai-kuta-ditata-kembali-agar-tidak-terkesan-kumuh/>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

Balipost. (2024). *Tuai Kritikan, Pantai Kuta Perlu Dikelola Lebih Profesional*. <https://www.balipost.com/news/2024/01/31/385801/Tuai-Kritikan,Pantai-Kuta-Perlu...html>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

Baliprawara.com. (2024). *PJ Gubernur Bali Sentil Pantai Kuta Sekarang Sangat Kumuh, Bahkan Sering Dikeluhkan Wisatawan*. <https://baliprawara.com/pj>

[gubernur-bali-sentil-pantai-kuta-sekarang-sangat-kumuh-bahkan-sering-dikeluhkan-wisatawan/](#). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

Baud-Bovy, and Lawson. (1998). *Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design*. London: Architectural Press.

CNN Indonesia,Awards. (2024). *Badung dan Komitmen Membangun Pariwisata Berkelanjutan*.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240510010041-25-1095914/badung-dan-komitmen-membangun-pariwisata-berkelanjutan>.

Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

Detikbali. (2022). *Pengamat Pariwisata Sebut Problem Kuta Beda dengan Hawaii*.

<https://www.detik.com/bali/wisata/d-6321094/pengamat-pariwisata-sebut-problem-kuta-beda-dengan-hawaii>. Diakses pada tanggal 12

Agustus 2024.

Dimuru. (2023). Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Di Pulau Hatta Kecamatan Banda Naira. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.

Diwangkara,dkk. (2020). Pengembangan Pariwisata Baturraden. *Jurnal Arsitektur*.

DPR RI, D. P. (2009.). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009*.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/527#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2010%20Tahun,bagian%20dari%20hak%20asasi%20manusia>.

Enga, N. d. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Studi Kasus di Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291-303. <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p291-303>Badung, D. P. (t.thn.). *Daya Tarik Wisata*. <https://dispar.badungkab.go.id/daya-tarik-wisata-67>.

- Hakim,dkk. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*.
- Husnayaen,dkk. (2024). Aksi Bersih Pantai Sebagai Upaya Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Pantai Kuta, Provinsi Bali. *Jurnal Abdi Insani*.
- Indonesia, B. P. (t.thn.). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2013* Pengelolaan Sampah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/26950/perda-kab-badung-no-7-tahun-2013>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.
- Khairan, D. d. (2024). Peran Pemerintah Desa Sedau dalam Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Jae. *Jurnal Sikap*.
- Lestari,dkk. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. *Journal of Economic Review*.
- Mertha,dkk. (2018). Stakeholders: Peran Dan Kendala Pelibatannya Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Bali. *Jurnal Kepariwisata*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi / Lexy J. Moleong*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati. (2021). Stakeholder Pariwisata. *Entrepreneurship-Business Creation*.
- Nusabali.com. (2024). *PUPR Pindahkan Gerobak Inovatif Respons Pantai Kuta Dinilai Kumuh*. <https://www.nusabali.com/berita/160206/pupr-pindahkan-gerobak-inovatif>.
- Nusabali.com. (Badung Tangani 1.464 Ton Sampah Kiriman, Pantai Kuta Paling Banyak). <https://www.nusabali.com/berita/165665/badung-tangani-1464-ton-sampah-kiriman-pantai-kuta-paling-banyak>.
- Pawestri, K. d. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai.

- Pratama. (t.thn.). Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Wisata Telaga Sarangan Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.
- Putra, A. M. (2020). Peran Pemerintah Daerah, Industri, Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kepariwisata Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional "Kapitalisme Media Dan Komunikasi Politik Di Era Revolusi Industri 4.0*.
- RI, B. (2023). *Bupati Giri Prasta Hibahkan Gedung Pasar Seni Kuta*. <https://bali.bpk.go.id/dari-media/bupati-giri-prasta-hibahkan-gedung-pasar-seni-kuta/>.
- RI, K. (2023). *Siaran Pers: Bali Masuk 10 Destinasi Terpopuler Dunia Versi TripAdvisor Ungguli London dan Paris*. <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/siaran-pers-bali-masuk-10-destinasi-terpopuler-dunia-versi-tripadvisor-ungguli-london-dan-paris>. Diakses pada 12 Agustus 2024.
- Riska, Muhammadiyah, & Sudarmi. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Kebun Raya Massenrempulu Kabupaten Enrekang. *Journal.Unismuh*, 1(3), 943-977. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index%0A>
- Rozak, B. d. (2012). Kualitas Dayatarik Wisata, Kepuasan Dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara Di Jawa Tengah.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Tahir, Dkk. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. *Journal Unismuh*.

- UNWTO. (2005). Report on the WTO Survey on the Implementation of the Global Code of Ethics for Tourism. *United Nation World Tourism Organization*.
- UNWTO. (2008). Glossary Of Tourism TermS. International Recommendations for Tourism Statistic 2008. *United Nation World Tourism Organization*.
- Wartabali,online.com. (2024). *Tanpa Memarginalkan Desa Adat, Pemkab Badung Akan Ambil Alih Pengelolaan Pantai*.  
<https://wartabalionline.com/2024/02/05/tanpa-memarginalkan-desaadat-pemkab-badung-akan-ambil-alih-pengelolaan-pantai/>.
- Wirawan. (2023). Fungsi Pemerintahan Kab. Badung Dalam Membantu Membangun Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Yusuf Hidayat, Laila Azkia, P. A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Candi Agung Di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 3(3), 483.  
<https://doi.org/10.20527/padaringan.v3i3.4020>
- Zulkarnaini. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.